

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali dan Wiwie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Adrian Sutedi, 2012, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andreas W. Finaka, Yuli Nurhanisah, Abdurrahman Naufal. *Cara Daftar dan Ganti Sertipikat Tanah Elektronik*. Indonesiabaik.id, 2022.
- B.F.Sihombing, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Cetakan kedua, PT Toko Gunung Agung, Tbk, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Jambatan, 2002.
- Chandra, S., 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*, Grasindo, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- G. Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan Indonesia*, PT Bineka Cipta. Jakarta. 1992.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Chaerudin, 1999, *Filsafat Suatu Ikhtisar*, FH UNSUR, Cianjur..
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta, Kencana.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Penerjemah Raisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung, 2007.
- Hengki Andora, 2021, *Penguasaan dan pengelolaan Tanah Pemerintah, konsep dan dialektika dalam sistem hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Aekola Surabaya, Surabaya.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Cet.XIX LP3ES, Jakarta.

Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

R. Raharjo, *Himpunan Istilah Pertanahan dan Yang Terkait*, Djambatan, Jakarta, 2008.

R. Soeprapto, 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, Jakarta, Mitra Sari.

Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*, Cetakan I, Mandar Maju, Jakarta.

Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sri Soedewi Maschun Syofwan, 2005, *Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta.

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika.

Urip Santoso, 2009, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Abdul Mukmin Rehas, *Sertipikat Sebagai Alat Bukti Sempurna Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 01 Oktober 2017.

Ardani, M. N. (2019). *Keterkaitan Asas Terjangkau dari Pendaftaran Tanah dengan Pelayanan Pendaftaran Tanah Berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Terhadap Pihak tertentu*. NOTARIUS, 12(1).

Desi Apriana, Arifin Burb, *Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, No. 2, Maret 2021.

- Enny Agustina, *Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik*, Jurnal Hukum, Volume 19 Nomor 3, Bulan September 2021.
- Fitriyani, Dwi Nurhayati, 2014 “*Perlindungan Hukum Bagi Sertipikat Ganda (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 286/Pdt.G/2012/Jkt-sel)*”,(Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).
- Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “*Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertamakali*”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2011.
- Monik Ajeng Puspitoarum D.W, *Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar*, Jurnal Administrative Reform, Vol.4 No.4, Oktober-Desember 2016.
- Mudemar A. Rasyidi, *Hukum Tanah Adalah Hukum Yang Sangat Penting, Dibutuhkan Oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jurnal Mitra Management, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Nur Hidayani, *Implementasi Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*, SASI: Jurnal Teakreditasi Internasional, Volume 27 Nomor 3, Juli - September 2021.
- Prama Widyanugraha, “*Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No.2, Maret 2019.
- Prayogo, T, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 Nomor 2, tahun 2018.
- Ratih, Novita Riska. “*Analisis Yuridis Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum.*” repository.unisma.ac.id, 2021.
- Risma, A. (2017). *Pemanfaatan Barang Milik Negara Idle Dalam Bentuk Sewa Menyewa Sebagai upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak*. In Ekp (Vol. 13, Issue 3).
- Rumiarta, I. N. P. B, *Kedudukan Peraturan Menteri pada Konstitusi*, Kerta Dyatmika, Jurnal Hukum, Vol 12 Nomor 2 tahun 2015.
- SILVIANA, Ana. *Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Administrative Law and Governance Journal, 2021.

Internet :

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sorong/baca-artikel/13579/Pengelolaan-Aset-JKN-dengan-Privatisasi.html>, diakses tanggal 27 Januari 2024 pukul 15.55 WIB.

Ardani, M. N. (2019). Keterkaitan Asas Terjangkau dari Pendaftaran Tanah dengan Pelayanan Pendaftaran Tanah Berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Terhadap Pihak tertentu. NOTARIUS, 12(1). <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23763>, diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 22:48 WIB

Arip Budiyanto, "Pengamanan Barang Milik Negara Dalam Rangka Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13043/Pengamanan-Barang-Milik-Negara-Dalam-Rangka-Tertib-Administrasi-Tertib-Fisik-dan-Tertib-ukum.html>, diakses pada 27 Februari 2024, pukul 20:58 WIB.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240420/9/1352391/dua-kota-jadipilot-project-Sertipikat-tanah-elektronik-dimana-saja>, diakses tanggal 20 April 2024, pukul 20.00 WIB

<https://money.kompas.com/read/2024/04/20/082623626/simak-penjelasan-lengkap-bpn-soal-Sertipikattanah-elektronik?page=all>, diakses tanggal 20 April 2024 pukul 12.00 WIB

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susundan Pendaftaran Tanah.

Permen ATR/Ka BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik
Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

